

**LAPORAN TRANSPARANSI
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR BKK WONOGIRI (PERSERODA)
TAHUN 2024**



**JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah
TELEPON: 0273 322214 - 0273 322747**



PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) pada tahun 2024 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja Perusahaan meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2024 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang belum sepenuhnya pulih.

Perusahaan memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Wonogiri. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada Perusahaan didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ Perusahaan meliputi seluruh tingkatan organisasi terutama Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan Perusahaan.

Perusahaan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Perusahaan untuk mencapai Visi, yaitu menjadi Bank yang sehat, besar, mandiri, dan mampu bersaing dan misi Perusahaan terutama dalam membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian di segala bidang.

Dalam penerapan Tata Kelola, Perusahaan selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur dan Infrastruktur, Proses, dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan. Namun demikian pada tahun 2024 terdapat kekosongan Komisaris Independen karena mengundurkan diri sehingga struktur tata kelola untuk faktor Dewan Komisaris tidak terpenuhi yang mengakibatkan penurunan Nilai Tata Kelola pada Peringkat 3 (Cukup Baik).

Perusahaan terus berupaya untuk mewujudkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan, dan sebagai wujud kepatuhan Perusahaan terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, saat ini sedang berlangsung proses Pengisian Komisaris Independen untuk memenuhi aspek struktur jumlah anggota Dewan Komisaris.



LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) Atas Penerapan Tata Kelola

Nama BPR	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
Alamat	JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah
Nomor Telepon	0273 322214 - 0273 322747
Posisi Laporan	31 Desember 2024
Peringkat Komposit	3
Predikat Komposit	Cukup Baik
Kesimpulan / Penjelasan	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut akan segera diperbaiki pada periode penerapan tata kelola kedepan. Terhadap belum terpenuhinya struktur Komisaris Independen dan Komite, Direksi berkomitmen untuk mengkomunikasikan hal tersebut dengan Pemegang Saham dan untuk saat ini sedang berlangsung proses pengisian Komisaris Independen.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	SARTI, SE.MM
	Jabatan	:	Direktur Utama
Tugas dan Tanggung Jawab :			
TUGAS :			
1. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.			
2. Menyusun perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (bisnis plan dan corporate plan).			
3. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi.			
4. Melakukan pembinaan dan pengendalian semua unit kerja pada perusahaan.			
TANGGUNG JAWAB			
1. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan.			
2. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan ketentuan.			
3. Menetapkan tata tertib Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
4. Mewakili Perusahaan baik di dalam ataupun di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Perusahaan.			
5. Membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
6. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik Perusahaan berdasarkan ketentuan.			
7. Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik Perusahaan berdasarkan ketentuan.			
8. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga atas nama Perusahaan.			
9. Wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Perusahaan di seluruh tingkatan			



	atau jenjang organisasi. 10. Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.	
2.	Nama	: YANI HARMINI, SP
	Jabatan	: Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	TUGAS 1. Membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam kegiatan umum dan operasional, keuangan, kepatuhan, perencanaan dan pengembangan serta tugas lain demi meningkatkan kinerja/produktifitas serta sesuai dengan tujuan Perusahaan. 2. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Menyusun rencana Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang di bidang non Pemasaran. 4. Mengkoordinir dan mengorganisir bidang non pemasaran dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. 5. Mengelola Sumber Daya Manusia dan Aset Tetap Inventaris perusahaan. 6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 7. Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lainnya serta Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan dan pedoman penyusunan laporan Perusahaan yang berlaku. TANGGUNG JAWAB 1. Membentuk satuan/unit kerja, tim dan/atau komite sesuai kebutuhan perusahaan. 2. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan. 3. Menetapkan tata tertib perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau menghapus melepaskan hak aktiva tetap dan inventaris berdasarkan ketentuan. 5. Membentuk Satuan/Unit Kerja, Badan Pertimbangan, Tim dan/atau Komite sesuai kebutuhan Perusahaan. 6. Menetapkan kebijakan dan mengendalikan bidang umum, SDM, TI, Perencanaan dan Pelaporan serta bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko termasuk APU dan PPT. 7. Menetapkan kebijakan umum, kepegawaian dan kedisiplinan pegawai, penghasilan pengurus dan pegawai, pensiun dan lain-lain bersama Direktur Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 8. Memonitor dan memastikan target perusahaan tercapai dengan efisien. 9. Menyusun Rencana Bisnis secara realistis.	
3.	Nama	: JOKO SANTOSO, SE
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	TUGAS 1. Membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam kegiatan pemasaran produk perbankan, baik dana dan kredit serta tugas lain demi meningkatkan kinerja/produktifitas serta sesuai dengan tujuan Perusahaan. 2. Menerapkan Tata Kelola pada pelaksanaan operasional bidang pemasaran di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Menyusun rencana Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang di bidang Pemasaran. 4. Mengkoordinir dan mengorganisir bidang pemasaran dan kantor operasional dalam kegiatan operasional perusahaan. 5. Melakukan riset dan pengembangan produk. 6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan	



Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
7. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kepada OJK, kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat.

TANGGUNG JAWAB

1. Menetapkan sasaran dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemasaran produk dan jasa Perusahaan.
2. Menetapkan kebijakan dalam administrasi kredit dan dana serta pengendalian terhadap bidang pemasaran.
3. Menetapkan produk dan layanan serta melakukan inovasi, baik dalam organisasi maupun operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Merekomendasikan/ mengusulkan penyelesaian pinjaman bermasalah melalui jalur hukum dengan tetap berpedoman pada prinsip cost and benefit.
5. Melakukan pelaksanaan pengawasan dalam penghimpunan dan pengelolaan dana Perusahaan.
6. Menetapkan suku bunga yaitu suku bunga Pinjaman, Antar Kantor, Simpanan, Antar Bank Pasiva dan tarif jasa lainnya.
7. Memonitor perkembangan suku bunga, kegiatan pemasaran produk dan jasa perusahaan serta mengusulkan kebijakan bidang pemasaran.
8. Melakukan inovasi dan perbaikan pemasaran kredit, dana dan produk layanan lainnya serta teknologi pemasarannya.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

1. Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan OJK telah dilaksanakan.
2. Perubahan Nama Perusahaan menjadi Bank Perekonomian Rakyat
3. Kerjasama dengan Notaris sedang dilakukan evaluasi terutama pada pemenuhan kewajiban pembayaran jasa pengikatan
4. Penempatan SDM khusus penanganan kredit hapus buku.
5. Melakukan evaluasi, monitoring, pendampingan pengendalian NPL terutama pada kantor cabang besar dengan NPL tinggi
6. Melaksanakan proses restrukturisasi kredit terhadap debitur bermasalah yang masih memiliki kemampuan usaha dan kemampuan bayar
7. Strategi penurunan LAR terutama untuk kredit DPK
8. Strategi penanganan NPL dengan Gugatan Sederhana
9. Perkembangan rencana digitalisasi perbankan
10. Dalam setiap keputusan kredit selalu berbasis risiko, dilakukan mitigasi risiko sedini mungkin agar potensi kerugian kredit dapat diminimalisir.
11. Pembinaan SDM terus dilakukan secara berkala, baik melalui pembinaan umum maupun coaching.
12. Bidang TI bersama bidang Perencanaan dan Akuntansi pada 2025 fokus pada perubahan sistem akuntansi dari SAKETAP menjadi SAKEP. Untuk saat ini sarana dan prasarana di bidang TI masih mumpuni untuk mengakomodir kebutuhan Core Banking Sistem.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan secara umum sebagian besar rekomendasi dari Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Andre Wahyu Yudhantoro, SE, MM
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Memimpin kegiatan anggota Dewan Komisaris. 2. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemegang Saham. 3. Memimpin rapat Dewan Komisaris. 4. Menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Komisaris.		



2.	Nama	:	FX. Pranata, AP., M.Hum
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugas. 2. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Komisaris Utama.		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
1. Pengisian kekosongan jabatan 2. Proses perubahan nama Perusahaan menjadi Bank Perekonomian Rakyat 3. Penerapan manajemen risiko dan penerapan tata kelola untuk dilakukan dengan lebih baik lagi 4. Pelaksanaan assessment pejabat 5. Fokus penanganan KKR dengan action plan 6. Penyaluran kredit agar lebih produktif 7. Penyaluran kredit kepada RT/RW agar lebih hati-hati dengan pengawasan yang ketat 8. Dalam penyelesaian kredit bermasalah agar benar-benar mempertimbangkan kualitas dokumen (Surat Perjanjian Kredit, Dokumen Penanganan dan Perikatan agunan) 9. Strategi pencapaian Pendapatan yang efektif antara lain dengan Penagihan PH serta penyelesaian kredit bermasalah yang telah membentuk PPAP 100%. 10. Dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja team penanganan kredit bermasalah serta melakukan strategi penanganan yang tepat agar NPL dan LAR dapat segera diturunkan 11. Penerapan tata kelola kredit dan manajemen risiko wajib ditingkatkan, upayakan setiap keputusan kredit selalu berbasis risiko, dengan mitigasi yang lebih tajam. 12. Pembinaan SDM agar terus dilakukan secara berkala, terutama motivasi pegawai sehingga pegawai yang ada berkinerja lebih efektif untuk bersama-sama mencapai tujuan perusahaan. 13. Maksimalkan digitalisasi perbankan yang dalam proses Kerjasama untuk peningkatan pelayanan dan brand image Perusahaan 14. Agar membentuk Tim khusus penangan NPL agar lebih focus dalam mencapai target NPL 15. Perubahan RBB agar mempertimbangkan rencana strategi pemasaran dengan memprediksikan pertumbuhan dana maupun kredit secara rasional berdasarkan historis. 16. Rencana pendapatan agar diperhitungkan korelasi antara pertumbuhan kredit dan penurunan NPL. 17. Simulasi pembentukan CKPN 18. Lebih berhati-hati dalam melakukan hubungan usaha dengan pihak ketiga karena ada wacana ranah perdata akan menjadi ranah pidana. Perkuat aspek hukum yang dituangkan dalam perjanjian Kerjasama.			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan secara umum sebagian besar rekomendasi telah ditindaklanjuti Direksi. Rekomendasi Dewan Komisaris tertuang dalam Notulen Rapat yang diselenggarakan bersama dengan anggota Direksi dengan rutinitas paling sedikit satu bulan sekali.			

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan penerapan Manajemen Risiko pada Perusahaan.



3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR memiliki komite Direksi yaitu komite kredit dan memiliki komite Dewan Komisaris yaitu komite pemantau risiko tetapi belum membentuk komite lainnya. Berdasarkan ketentuan POJK No 9 Tahun 2024 BAB XVIII Ketentuan Peralihan, BPR diberikan jangka waktu untuk memenuhi ketentuan paling lambat tanggal 31 Desember 2025	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.	Yudhi Rengga Setiawan, S.STP.,M.M	Memiliki kompetensi sebagai Pemantau Risiko yang dibuktikan kepemilikan Sertifikasi Manajemen Risiko jenjang 5.	Anggota (Komite Pemantau Resiko)	Iya
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	-	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	3
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
Penjelasan Lebih Lanjut			
Anggota Komite Pemantau Risiko melakukan tugas dan tanggungjawab pengawasan bersama dengan Ketua Komite yaitu Komisaris Independen sehingga beberapa rapat dilakukan bersama dengan rapat Pengurus.			



B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	SARTI, SE.MM	Rp0	0%
2.	YANI HARMINI, SP	Rp0	0%
3.	JOKO SANTOSO, SE	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Direksi tidak ada yang memiliki saham pada BPR.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	SARTI, SE.MM	-	-	0%
2.	YANI HARMINI, SP	-	-	0%
3.	JOKO SANTOSO, SE	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak ada yang memiliki saham pada perusahaan lain.				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	SARTI, SE.MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	YANI HARMINI, SP	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	JOKO SANTOSO, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dengan sesama Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga
-----	--------------	-------------------



		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	SARTI, SE.MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	JOKO SANTOSO, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	YANI HARMINI, SP	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan sesama Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Andre Wahyu Yudhantoro, SE, MM	Rp0	0%
2.	FX. Pranata, AP, M.Hum	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki saham pada BPR.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Andre Wahyu Yudhantoro, SE, MM	-	-	0%
2.	FX. Pranata, AP, M.Hum	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki saham pada Perusahaan lain.				

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Andre Wahyu Yudhantoro, SE, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	FX. Pranata, AP, M.Hum	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				



Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dengan sesama Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pemegang Saham.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Andre Wahyu Yudhantoro, SE, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	FX. Pranata, AP, M.Hum	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan sesama Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pemegang Saham.				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp268.953.600	3	Rp545.006.880
2.	Tunjangan	3	Rp1.134.852.000	0	Rp0
3.	Tantiem	3	Rp354.009.283	4	Rp157.786.996
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	3	Rp292.662.700	3	Rp209.574.605
Total			Rp2.050.477.583		Rp912.368.481
Penjelasan Lebih Lanjut :					
1. Remunerasi Lainnya terdiri dari Tunjangan Hari Raya, Penghargaan target kinerja dan jasa pengabdian habis masa jabatan Komisaris Independen yang diberikan berdasarkan ketentuan perusahaan dan dianggarkan dalam RBB.					
2. Penetapan penghasilan Direksi dan Komisaris telah mendapatkan persetujuan RUPS LB Tanggal 29 November 2023 dengan agenda RUPS LB pengesahan RBB Tahun anggaran 2024.					
3. Penerima Tantiem Dewan Komisaris 4 orang karena Komisaris Utama yang habis masa jabatan pada tahun 2023 masih mendapatkan bagian tantiem yang dihitung secara proporsional dengan Komisaris Utama yang menggantikan.					



2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	MOBIL (3)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS (3)	BPJS (1)
4.	Fasilitas Lainnya	TABLET (3)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
-			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4.57 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.42 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio Gaji dihitung berdasarkan gaji beserta semua tunjangan yang diterima selama 1 tahun	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	26 Januari 2024	5	Evaluasi Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Kerja Tahun 2024
2.	03 Februari 2024	5	Evaluasi Kinerja Bulan Januari 2024 dan Pembahasan Lain
3.	04 Maret 2024	5	Evaluasi Kinerja Bulan Februari 2024 dan Pembahasan Lain
4.	20 April 2024	9	Evaluasi kinerja Triwulan I Tahun 2024, tindak lanjut LHP OJK dan Action Plan Perbaikan Kualitas Kredit
5.	18 Mei 2024	6	Rencana Digitalisasi Perbankan



6.	14 Juni 2024	6	Evaluasi Kinerja Mei 2024, Paparan Direktur Pemasaran Action Plan Penurunan LAR, Perubahan RBB 2024.
7.	12 Juli 2024	5	Evaluasi kinerja Triwulan II Tahun 2024, Action Plan Perbaikan Kualitas Kredit, tindak lanjut Temuan OJK dan KAP dan Permasalahan SDM
8.	24 September 2024	5	Evaluasi Kinerja bulan Agustus 2024 dan beberapa hal berkaitan dengan Operasional Perusahaan
9.	11 Oktober 2024	5	Evaluasi Kinerja Bulan September 2024
10.	05 November 2024	5	Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 dan agenda lainnya
11.	14 Desember 2024	5	Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko dan APU PPT
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi tahun 2024 telah melaksanakan rapat sebanyak 11 kali.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Andre Wahyu Yudhantoro, SE, MM	9	2	100%
2.	FX. Pranata, AP., M.Hum	9	2	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris Tahun 2024 melaksanakan rapat sebanyak 11 kali dengan tingkat kehadiran a. komisaris utama menghadiri 11 pertemuan b. Komisaris menghadiri sebanyak 11 kali pertemuan c. Komisaris Independen pada tahun 2024 menghadiri rapat sebanyak 6 kali, dan diberhentikan sebagai komisaris independen karena mengundurkan diri berdasarkan RUPS LB tanggal 28 Juni 2024.				



I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	2	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		2		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	2	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Dalam Tahun 2024: 1. Tidak terdapat fraud di tahun 2024 2. Proses penyelesaian penyimpangan tahun sebelumnya di KC Girimarto sebanyak 2 kasus dengan hukuman disiplin sedang kepada 1 (satu) pegawai dengan diterbitkannya SK No 19/II/Kep.Dir.2024 dan hukuman disiplin ringan kepada 5 (lima) pegawai dengan diterbitkannya SK No 20/II/Kep.Dir/2024, SK No 21/II/Kep.Dir/2024, SK No 22/II/Kep.Dir/2024, SK No 23/II/Kep.Dir/2024, SK No 24/II/Kep.Dir/2024								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	1	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Dalam tahun 2024 terdapat permasalahan hukum Relas Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Wng yang masih dalam proses.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			



1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Dalam semester I tahun 2024 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	03 Januari 2024	Sosial	Bantuan RTLH kepada Bp. Sularno, Dusun Pule RT 03 RW 03 Kelurahan Jatipurno dari dana CSR	Bp Sularno	Rp10.000.000
2.	09 Januari 2024	Sosial	Pembagian Paket Sembako HUT Merger Ke-18 (295 paket @100,000) untuk Kantor Cabang dari dana CSR	Masyarakat Kabupaten Wonogiri	Rp29.500.000
3.	16 Januari 2024	Sosial	Bantuan Yayasan Penyandang Cacat Tubuh Polio "Bina Kami" dari dana CSR	Yayasan Penyandang Cacat Tubuh Polio "Bina Kami"	Rp100.000
4.	17 Januari 2024	Sosial	Bantuan pembangunan Masjid Sunan Kalijaga Dawuhan Hargorejo Tirtomoyo dari dana ZIS	Masjid Sunan Kalijaga Dawuhan Hargorejo Tirtomoyo	Rp2.000.000
5.	19 Januari 2024	Sosial	Pembagian Paket Sembako HUT Merger Ke-18 (30 paket @100,000) untuk KPO dari dana CSR	Masyarakat Kabupaten Wonogiri	Rp3.000.000
6.	24 Januari 2024	Sosial	Pembagian Paket Sembako untuk nasabah KC Slogohimo terdampak kebakaran Pasar Slogohimo (130 paket @100,000) dari dana CSR	Nasabah KC Slogohimo	Rp13.000.000
7.	05 Februari 2024	Sosial	Simpel Ayah KC Baturetno bl Februari dari dana CSR	Nasabah	Rp300.000
8.	05 Februari 2024	Sosial	Bantuan Jamban an. Bp. Wagiyu, Dusun Ngasinan Desa Wonoharjo dari dana CSR	Bp Wagiyu	Rp3.000.000



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

9.	05 Februari 2024	Sosial	Bantuan Jamban an. Bp. Damono, Dusun Ngasinan Desa Wonoharjo dari dana CSR	Bp Damono	Rp3.000.000
10.	08 Maret 2024	Sosial	Bantuan kegiatan "Gebyar Ramadhan" Majelis Ta'lim An Nur Yassin Singodutan Selogiri dari dana ZIS	Majelis Ta'lim An Nur Yassin Singodutan Selogiri	Rp3.000.000
11.	14 Maret 2024	Sosial	Bantuan kegiatan "Kampoeng Ramadhan" Masjid Besar An Nur Tirtomoyo dari dana ZIS	Masjid Besar An Nur Tirtomoyo	Rp1.000.000
12.	15 Maret 2024	Sosial	Bantuan Takjil Masjid Taqwa Ngadirojo dari dana ZIS	Masjid Taqwa Ngadirojo	Rp500.000
13.	15 Maret 2024	Sosial	Bantuan Karpas Masjid (2 lembar) Masjid Nurul Huda Pencil Wuryorejo Wonogiri dari dana ZIS	Masjid Nurul Huda Pencil Wuryorejo Wonogiri	Rp6.400.000
14.	19 Maret 2024	Sosial	Bantuan Al Qur'an dalam rangka Safari Ramadhan Kecamatan Giritontro dari dana ZIS	Masyarakat Kecamatan Giritontro	Rp1.043.000
15.	22 Maret 2024	Sosial	Simpel Ayah KC Giriwoyo dari dana CSR	Nasabah	Rp300.000
16.	25 Maret 2024	Sosial	Bantuan Yayasan Krida Karya dari dana CSR	Yayasan Krida Karya	Rp100.000
17.	28 Maret 2024	Sosial	Bantuan PWRI Kabupaten Wonogiri bl Maret dari dana ZIS	PWRI Kabupaten Wonogiri	Rp500.000
18.	28 Maret 2024	Sosial	Bantuan Panti Wredha Kabupaten Wonogiri bl Maret dari dana ZIS	Panti Wredha Kabupaten Wonogiri	Rp500.000
19.	28 Maret 2024	Sosial	Bantuan BAZDA Kabupaten Wonogiri bm Maret dari dana ZIS	BAZDA Kabupaten Wonogiri	Rp500.000
20.	28 Maret 2024	Sosial	Bantuan Pondok Pesantren bl Maret dari dana ZIS	Pondok Pesantren	Rp1.500.000
21.	30 Maret 2024	Sosial	Pembagian Paket Sembako Ramadhan (paket sembako @100.000) dari dana CSR	Masyarakat Kabupaten Wonogiri	Rp33.000.000
22.	01 April 2024	Sosial	Pembagian Takjil Gratis dari dana CSR	Masyarakat Kabupaten	Rp1.378.000



				Wonogiri	
23.	01 April 2024	Sosial	Bantuan Panti Asuhan Aisyiah dari dana CSR	Panti Asuhan Aisyiah	Rp3.000.000
24.	03 April 2024	Sosial	Simpel Ayah KC Jatipurno bl April dari dana CSR	Nasabah	Rp300.000
25.	15 April 2024	Sosial	Simpel Ayah KC Girimarto bl April dari dana CSR	Nasabah	Rp300.000
26.	18 April 2024	Sosial	Pembangunan TPQ Beji 2 Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dari dana ZIS	Masyarakat Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas	Rp1.000.000
27.	29 April 2024	Sosial	Bantuan PWRI Kabupaten Wonogiri bl April dari dana ZIS	PWRI Kabupaten Wonogiri	Rp500.000
28.	29 April 2024	Sosial	Bantuan Panti Wredha Kabupaten Wonogiri bl April dari dana ZIS	Panti Wredha Kabupaten Wonogiri	Rp500.000
29.	29 April 2024	Sosial	Bantuan BAZDA Kabupaten Wonogiri bl April dari dana ZIS	BAZDA Kabupaten Wonogiri	Rp500.000
30.	29 April 2024	Sosial	Bantuan Pondok Pesantren bl April dari dana ZIS	Pondok Pesantren	Rp1.500.000
31.	02 Mei 2024	Sosial	Pembagian Takjil Rutan dari dana CSR	Narapidana Lapas	Rp8.000.000
32.	02 Mei 2024	Sosial	Bantuan RTLH Bp. Sugito, Dusun Tanggung RT 01 RW 04 Sonoharjo dari dana CSR	Bp. Sugito	Rp10.000.000
33.	27 Mei 2024	Sosial	Bantuan PWRI Kabupaten Wonogiri bl Mei dari dana ZIS	PWRI Kabupaten Wonogiri	Rp500.000
34.	27 Mei 2024	Sosial	Bantuan Panti Wredha Kabupaten Wonogiri bl Mei dari dana ZIS	Panti Wredha Kabupaten Wonogiri	Rp500.000
35.	27 Mei 2024	Sosial	Bantuan BAZDA Kabupaten Wonogiri bl Mei dari dana ZIS	BAZDA Kabupaten Wonogiri	Rp500.000
36.	27 Mei 2024	Sosial	Bantuan Pondok Pesantren bl Mei dari dana ZIS	Pondok Pesantren	Rp1.500.000
37.	11 Juni 2024	Sosial	Simpel Ayah KPO bl Juni dari dana CSR	Nasabah	Rp600.000
38.	14 Juni 2024	Sosial	Beasiswa 4 siswa dalam kegiatan BKK Goes To School di SMA Negeri 1 Purwantoro dari dana CSR	4 siswa dalam kegiatan BKK Goes To School di SMA Negeri 1 Purwantoro	Rp1.200.000
39.	14 Juni 2024	Sosial	Bantuan Kambing	Masjid Ar Rohim	Rp3.350.000



			Kurban untuk Masjid Ar Rohim Pengadilan Negeri Wonogiri dari dana CSR	Pengadilan Negeri Wonogiri	
40.	15 Juni 2024	Sosial	Bantuan Sapi Kurban untuk Dusun Pule Desa Kerjo Kidul Kecamatan Ngadirojo dari dana CSR	Masyarakat Dusun Pule Desa Kerjo Kidul Kecamatan Ngadirojo	Rp30.000.000
41.	20 Juni 2024	Sosial	Bantuan Pembangunan Serambi Masjid Jami' Kranggan Batuwarno dari dana ZIS	Masjid Jami' Kranggan Batuwarno	Rp1.000.000
42.	24 Juni 2024	Sosial	Beasiswa 4 siswa dalam kegiatan BKK Goes To School di SMK Negeri 1 Bulukerto dari dana CSR	4 siswa dalam kegiatan BKK Goes To School di SMK Negeri 1 Bulukerto	Rp1.000.000
43.	27 Juni 2024	Sosial	Bantuan PWRI Kabupaten Wonogiri bl Juni dari dana ZIS	PWRI Kabupaten Wonogiri	Rp500.000
44.	27 Juni 2024	Sosial	Bantuan Panti Wredha Kabupaten Wonogiri bl Juni dari dana ZIS	Panti Wredha Kabupaten Wonogiri	Rp500.000
45.	27 Juni 2024	Sosial	Bantuan BAZDA Kabupaten Wonogiri bl Juni dari dana ZIS	BAZDA Kabupaten Wonogiri	Rp500.000
46.	27 Juni 2024	Sosial	Bantuan Pondok Pesantren bl Juni dari dana ZIS	Pondok Pesantren	Rp1.500.000
47.	09 Juli 2024	Sosial	Bantuan Sarpras AC Masjid As Salam Sanggrahan Giripurwo bl Juli dari dana ZIS	Masjid As Salam	Rp1.000.000
48.	12 Juli 2024	Sosial	Santunan Anak Yatim Masjid Al Mu'min Polres Wonogiri (34 anak) bl Juli dari dana ZIS	Anak Yatim Masjid Al Mu'min Polres Wonogiri	Rp3.400.000
49.	16 Juli 2024	Sosial	Simpel Ayah KPO bl Juli dari dana CSR	Nasabah	Rp600.000
50.	23 Juli 2024	Sosial	Bantuan Kendaraan VIAR Kelurahan Wonokarto bl Juli dari dana CSR	Kelurahan Wonokarto	Rp30.800.000
51.	24 Juli 2024	Sosial	Simpel Ayah KC Jatipurno bl Juli dari dana CSR	Nasabah	Rp300.000
52.	29 Juli 2024	Sosial	Bantuan PWRI Kabupaten Wonogiri bl Juli dari dana ZIS	PWRI Kabupaten Wonogiri	Rp500.000
53.	29 Juli 2024	Sosial	Bantuan Panti Wredha Kabupaten Wonogiri bl Juli dari dana ZIS	Panti Wredha Kabupaten Wonogiri	Rp500.000



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

54.	29 Juli 2024	Sosial	Bantuan BAZDA Kabupaten Wonogiri bl Juli dari dana ZIS	BAZDA Kabupaten Wonogiri	Rp500.000
55.	29 Juli 2024	Sosial	Bantuan Pondok Pesantren bl Juli dari dana ZIS	Pondok Pesantren	Rp1.500.000
56.	02 Agustus 2024	Sosial	CSR SD Kepatihan 2 Selogiri	SD Kepatihan 2 Selogiri	Rp3.000.000
57.	13 Agustus 2024	Sosial	Pelebaran Mushola Desa Purworejo dari dana CSR	Mushola Desa Purworejo	Rp9.000.000
58.	16 Agustus 2024	Sosial	Donasi Untuk Pulau Alor dalam rangka HUT RI diserahkan oleh Tim PKK Pusat dikorodindir oleh DPP Perbamida dari dana CSR	Pulau Alor	Rp1.000.000
59.	21 Agustus 2024	Sosial	Simpel Ayah KC Baturetno bl Agustus dari dana CSR	Nasabah	Rp300.000
60.	26 Agustus 2024	Sosial	Bantuan PWRI Kabupaten Wonogiri bl Agustus dari dana ZIS	PWRI Kabupaten Wonogiri	Rp500.000
61.	26 Agustus 2024	Sosial	Bantuan Panti Wredha Kabupaten Wonogiri bl Agustus dari dana ZIS	Panti Wredha Kabupaten Wonogiri	Rp500.000
62.	26 Agustus 2024	Sosial	Bantuan BAZDA Kabupaten Wonogiri bl Agustus dari dana ZIS	BAZDA Kabupaten Wonogiri	Rp500.000
63.	26 Agustus 2024	Sosial	Bantuan Pondok Pesantren bl Agustus dari dana CSR	Pondok Pesantren	Rp1.500.000
64.	26 Agustus 2024	Sosial	Simpel Ayah KC Girimarto bl Agustus dari dana CSR	Nasabah	Rp300.000
65.	28 Agustus 2024	Sosial	Simpel Ayah KC Ngadirojo bl Agustus dari dana CSR	Nasabah	Rp300.000
66.	03 September 2024	Sosial	Santunan Siswa MTS Negeri 3 Wonogiri (Purwantoro) 40 siswa dari dana CSR	Siswa MTS Negeri 3 Wonogiri	Rp4.000.000
67.	04 September 2024	Sosial	Simpel Ayah KPO bl September dari dana CSR	Nasabah	Rp600.000
68.	04 September 2024	Sosial	Simpel Ayah KC Batuwarno dari dana CSR	Nasabah	Rp300.000
69.	26 September 2024	Sosial	Bantuan PWRI Kabupaten Wonogiri bl September dari dana ZIS	PWRI Kabupaten Wonogiri	Rp500.000



70.	26 September 2024	Sosial	Bantuan Panti Wredha Kabupaten Wonogiri bl September dari dana ZIS	Panti Wredha Kabupaten Wonogiri	Rp500.000
71.	26 September 2024	Sosial	Bantuan BAZDA Kabupaten Wonogiri bl September dari dana ZIS	BAZDA Kabupaten Wonogiri	Rp500.000
72.	26 September 2024	Sosial	Bantuan Pondok Pesantren bl September dari dana ZIS	Pondok Pesantren	Rp1.500.000
73.	02 Oktober 2024	Sosial	Bantuan Pembangunan Masjid Al Barokah (Ngebrak Lor Giriwoyo) dari dana CSR	Masjid Al Barokah	Rp5.000.000
74.	07 Oktober 2024	Sosial	Simpel Ayah KC Ngadirojo bl Oktober dari dana CSR	Nasabah	Rp600.000
75.	09 Oktober 2024	Sosial	Penanganan Stunting di Kabupaten Wonogiri dari dana CSR	Masyarakat Wonogiri	Rp50.000.000
76.	15 Oktober 2024	Sosial	Bantuan Masjid YAMP Nurul Falah Talunombo Baturetno dari dana ZIS	Masjid YAMP Nurul Falah	Rp1.000.000
77.	25 Oktober 2024	Sosial	Bantuan Stunting Desa Pule Selogiri dari dana CSR	Masyarakat Desa Pule Kecamatan Selogiri	Rp2.033.100
78.	28 Oktober 2024	Sosial	Bantuan RTLH Bp. Nasaret Wicaksana d/ a. Pokoh RT 003 RW 001 Wonoboyo Wonogiri dari dana CSR	Bp Nasaret Wicaksana	Rp10.000.000
79.	29 Oktober 2024	Sosial	Bantuan PWRI Kabupaten Wonogiri bl Oktober dari dana ZIS	PWRI Kabupaten Wonogiri	Rp500.000
80.	29 Oktober 2025	Sosial	Bantuan Panti Wredha Kabupaten Wonogiri bl Oktober dari dana ZIS	Panti Wredha Kabupaten Wonogiri	Rp500.000
81.	29 Oktober 2024	Sosial	Bantuan BAZDA Kabupaten Wonogiri bl Oktober dari dana ZIS	BAZDA Kabupaten Wonogiri	Rp500.000
82.	29 Oktober 2024	Sosial	Bantuan Pondok Pesantren bl Oktober dari dana CSR	Pondok Pesantren	Rp1.500.000
83.	04 September 2024	Sosial	Simpel Ayah KC Batuwarno bl September dari dana CSR	Nasabah	Rp300.000



84.	09 September 2024	Sosial	Bantuan Masjid Al Birr Batuwarno dari dana ZIS	Masjid Al Birr	Rp5.000.000
85.	29 Oktober 2024	Sosial	Bantuan Pondok Pesantren bl Oktober dari dana ZIS	Pondok Pesantren	Rp1.500.000
86.	29 Oktober 2024	Sosial	Simpel Ayah KC Baturetno bl Oktober dari dana CSR	Nasabah	Rp300.000
87.	29 Oktober 2024	Sosial	Bantuan Pembuatan Sumur Pompa Ds Mlokomanis Wetan Kec. Ngadirojo (Desa Dampingan) dari dana CSR	Ds Mlokomanis Wetan Kec. Ngadirojo	Rp15.000.000
88.	31 Oktober 2024	Sosial	Bantuan Pembuatan Sumur Pompa Ds Gemawang Kec. Ngadirojo (Desa Dampingan) dari dana CSR	Ds Gemawang Kec. Ngadirojo	Rp15.000.000
89.	11 November 2024	Sosial	Simpel Ayah KC Giritontro bl November dari dana CSR	Nasabah	Rp300.000
90.	11 November 2024	Sosial	Simpel Ayah KPO bl November dari CSR	Nasabah	Rp300.000
91.	15 November 2024	Sosial	Simpel Ayah KC Girimarto bl November dari dana CSR	Nasabah	Rp300.000
92.	20 November 2024	Sosial	Simpel Ayah KPO bl November dari dana CSR	Nasabah	Rp600.000
93.	21 November 2024	Sosial	Bantuan Pembangunan Mushola Al Amin SD Negeri 2 Kerjo Lor Ngadirojo dari dana ZIS	Mushola Al Amin SD Negeri 2 Kerjo Lor	Rp1.000.000
94.	21 November 2024	Sosial	Simpel Ayah KC Jatiroto bl November dari dana CSR	Nasabah	Rp300.000
95.	21 November 2024	Sosial	Simpel Ayah KC Tirtomoyo bl November 1 dari dana CSR	Nasabah	Rp600.000
96.	22 November 2024	Sosial	Simpel Ayah KC Tirtomoyo bl November 2 dari dana CSR	Nasabah	Rp300.000
97.	26 November 2024	Sosial	Bantuan PWRI Kabupaten Wonogiri bl November dari dana ZIS	PWRI Kabupaten Wonogiri	Rp500.000
98.	26 November 2024	Sosial	Bantuan Panti Wredha	Panti Wredha	Rp500.000



			Kabupaten Wonogiri bl November dari dana ZIS	Kabupaten Wonogiri	
99.	26 November 2024	Sosial	Bantuan BAZDA Kabupaten Wonogiri bl November dari dana ZIS	BAZDA Kabupaten Wonogiri	Rp500.000
100.	26 November 2024	Sosial	Bantuan Pondok Pesantren bl November dari dana ZIS	Pondok Pesantren	Rp1.500.000
101.	30 November 2024	Sosial	Simpel Ayah KC Giriwoyo bl November dari dana CSR	Nasabah	Rp300.000
102.	03 Desember 2024	Sosial	Bantuan Masjid Syarif Hidayatullah (Tandon Pare Selogiri) dari dana ZIS	Masjid Syarif Hidayatullah	Rp5.000.000
103.	05 Desember 2024	Sosial	Partisipasi Kegiatan Khitanan Masal bersama IWAPI Wonogiri dari dana ZIS	Khitanan Masal	Rp7.500.000
104.	09 Desember 2024	Sosial	Bantuan pembangunan ruang kelas SLB Al Ishlah Jatisrono dari dana ZIS	SLB Al Ishlah	Rp1.000.000
105.	09 Desember 2024	Sosial	Simpel Ayah KC Jatiroto bl Desember dari dana CSR	Nasabah	Rp600.000
106.	11 Desember 2024	Sosial	Simpel Ayah KPO bl Desember dari dana CSR	Nasabah	Rp300.000
107.	17 Desember 2024	Sosial	Simpel Ayah KC Ngadirojo bl Desember dari dana CSR	Nasabah	Rp300.000
108.	18 Desember 2024	Sosial	Bantuan pemasangan CCTV Masjid Abdurrahman Kedungringin Wonogiri dari dana ZIS	Masjid Abdurrahman	Rp2.000.000
109.	24 Desember 2024	Sosial	Bantuan PWRI Kabupaten Wonogiri bl Desember dari dana ZIS	PWRI Kabupaten Wonogiri	Rp500.000
110.	24 Desember 2024	Sosial	Bantuan Panti Wredha Kabupaten Wonogiri bl Desember dari dana ZIS	Panti Wredha Kabupaten Wonogiri	Rp500.000
111.	24 Desember 2024	Sosial	Bantuan BAZDA Kabupaten Wonogiri bl Desember dari dana ZIS	BAZDA Kabupaten Wonogiri	Rp500.000



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah
Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

112.	24 Desember 2024	Sosial	Bantuan Pondok Pesantren bl Desember dari dana ZIS	Pondok Pesantren	Rp1.500.000
113.	30 Desember 2024	Sosial	Bantuan pembelian tanah waqaf Masjid Al Yaqqin Girimarto dari dana ZIS	Masjid Al Yaqqin	Rp1.000.000
114.	30 Desember 2024	Sosial	Bantuan RTLH An. Tumirin (Gesing Kismantoro) dari dana CSR	Bp Tumirin	Rp10.000.000
115.	30 Desember 2024	Sosial	Bantuan RTLH AN. Mukijo (Gadungan Kismantoro) dari dana CSR	Bp Mukijo	Rp9.992.000
116.	30 Desember 2024	Sosial	Bantuan RTLH An. Bejan (Terbis Kismantoro) dari dana CSR	Bp Bejan	Rp15.000.000
117.	30 Desember 2024	Sosial	CSR UMKM Manunggal Roso Kismantoro dari dana CSR	UMKM Manunggal Roso	Rp10.000.000
118.	30 Desember 2024	Sosial	Bantuan RTLH An. Pujiyanto (Mijil Kismantoro) dari dana CSR	Bp Pujiyanto	Rp14.997.000
119.	30 Desember 2024	Sosial	Bantuan RTLH An. Kateno (Lemahbang Kismantoro) dari dana CSR	Bp Kateno	Rp14.994.000
120.	30 Desember 2024	Sosial	Simpel Ayah KC Ngadirojo bl Desember 2 dari dana CSR	Nasabah	Rp300.000

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial sebanyak 120 kegiatan, yang diberikan untuk Kegiatan Sosial, Pendidikan, Keagamaan, dan UMKM.

Wonogiri, 28 Januari 2024

PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)



Andre Wahyu Yudhantoro, S.E., M.M
Komisaris Utama

Menyetujui



Sarti, SE, MM
Direktur Utama



KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

Nama BPR : PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
Alamat : JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah
Nomor Telepon : 0273 322214 - 0273 322747
Posisi Laporan : Tahun 2024
Modal Inti : Rp68.421.949.076
Total Aset : Rp703.084.760.020

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 2 (Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 4 (Kurang Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Nilai 4 (Kurang Memadai)
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 2 (Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 2 (Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 2 (Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 2 (Memadai)
Peringkat Komposit		3
Predikat Komposit		Cukup Baik



Kesimpulan

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut akan segera diperbaiki pada periode penerapan tata kelola kedepan. Terhadap belum terpenuhinya struktur Komisaris Independen dan Komite, Direksi berkomitmen untuk mengkomunikasikan hal tersebut dengan Pemegang Saham dan untuk saat ini sedang berlangsung proses pengisian Komisaris Independen.

Faktor Positif

A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur

1. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
2. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
3. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.
4. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.
5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.
6. Struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
7. Struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
8. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR berada dalam kondisi terpenuhi secara keseluruhan.
9. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.
10. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.

B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada BPR saat ini dinilai memadai.
2. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang dimiliki BPR dinilai memadai.
3. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR berada dalam kondisi memadai.
4. Proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit dinilai memadai.
5. Proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR saat ini dinilai memadai.
6. Proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR dinilai memadai.

C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham yang dimiliki BPR dinilai memadai.
2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung



Jawab, dan Wewenang Direksi BPR tergolong memadai.

3. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang dinilai memadai.
4. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan berjalan dengan memadai.
5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern dengan penilaian memadai.
6. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR adalah memadai.
7. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan penilaian memadai.
8. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi BPR tergolong cukup memadai.
9. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR yang dinilai memadai.

Faktor Negatif

A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur

1. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris belum sesuai dengan ketentuan yaitu paling sedikit 3 (tiga) orang. Namun, saat ini BPR hanya memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan salah satunya menjabat sebagai Komisaris Utama. Sehingga masih terdapat kekosongan yaitu jabatan Komisaris Independen, saat ini sedang proses rekrutmen dan akan dilengkapi pada semester 1 tahun 2025
2. Struktur organisasi telah disusun dengan memperhatikan penerapan tata kelola yang baik dan kompleksitas usaha BPR. Namun demikian belum dibentuknya komite audit dan komite remunerasi dan nominasi, yang akan dilengkapi saat proses konsolidasi

B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Fungsi dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Pada aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terdapat beberapa hal yang dapat disampaikan, antara lain sebagai berikut: a. risalah rapat dewan komisaris belum terdapat pembahasan terkait dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan, penerapan manajemen risiko, penerapan sistem pengendalian intern seperti evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko sekurang-kurangnya secara triwulanan serta pengawasan pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko sesuai profil risiko bank. b. fungsi kepatuhan belum terdapat bukti bentuk monitoring hasil tindak lanjut direksi atas hasil pengawasan dari dewan komisaris sebagaimana pasal 44 POJK Nomor 9 Tahun 2024. c. belum terdapat evaluasi dewan komisaris terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh direksi.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Terdapat kelemahan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, sebagai berikut: a. belum terdapat bukti tindak lanjut dari direksi terhadap arahan Dewan Komisaris. b. penerapan fungsi kepatuhan oleh Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan belum optimal terutama pada mitigasi risiko dalam proses perkreditan. c. belum terdapat kertas kerja monitoring terhadap pemenuhan temuan hasil audit baik internal maupun eksternal oleh direksi sebagaimana tata tertib kerja Dewan Komisaris.
3. Penerapan Fungsi Kepatuhan Terdapat kelemahan pada penerapan fungsi kepatuhan, yaitu: a. belum secara efektif mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan Direksi, melalui review ketentuan dan melakukan pengkinian, membuat SOP yang belum diatur, menyiapkan SOP baru sesuai ketentuan baru regulator b. belum adanya periode evaluasi ketentuan- ketentuan internal bank untuk melakukan penyempurnaan kebijakan,



ketentuan, sistem maupun prosedur c. belum terdapat kertas kerja yang digunakan untuk memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR sehingga tidak terdapat dokumentasi yang menunjukkan bahwa proses pemantauan tersebut telah dilaksanakan secara efektif

4. Penerapan Fungsi Audit Intern BPR telah menunjuk pegawai yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit internal. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian BPR terkait dengan penyusunan rencana pemeriksaan, antara lain: a. Proses perencanaan audit intern tahun 2024 oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) belum memuat cakupan sebagaimana Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7 / SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat. b. Audit intern belum pernah menyusun audit program sebelum melakukan pemeriksaan ke unit atau satuan kerja yang akan dijadikan obyek audit (auditee).
5. Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko belum terdapat evaluasi dewan komisaris terhadap pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh direksi.

C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan Pada posisi pemeriksaan, terdapat pelanggaran ketentuan antara lain terkait pelaksanaan restrukturisasi kredit dan kesalahan pelaporan laporan bulanan namun tidak berdampak material pada kondisi keuangan BPR
2. Kelemahan penerapan teknologi informasi dalam rangka mendukung kegiatan operasional belum menjadi perhatian, tercermin dari kelemahan core banking system diantaranya belum mengakomodir pelaksanaan APU dan PPT.

Wonogiri, 28 Januari 2025

PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)



ANDRE WAHYU YUDHANTORO, S.E., M.M
Komisaris Utama

Menyetujui



SARTI, S.E., M.M
Direktur Utama



KERTAS KERJA LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

Faktor 1. Aspek Pemegang Saham

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah Terpenuhi	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.</i>
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah Terpenuhi	<i>Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Baik	<i>Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris dinilai baik</i>
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Baik	<i>Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris dilakukan minimal satu kali sebulan sehingga dinilai baik.</i>
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Baik	<i>Penilaian terhadap indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, yang dimiliki BPR adalah baik.</i>
6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Sangat Baik	<i>Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, dengan penilaian sangat baik.</i>



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Baik	<i>Pengambilan keputusan melalui RUPS telah memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Baik	<i>Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil. Dalam pelaksanaan aksi korporasi, perlakuan yang adil diantaranya dalam hal pembagian Dividen yang dilaksanakan secara proporsional berdasarkan setoran modal.</i>
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Baik	<i>Perkembangan kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.</i>
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Sangat Baik	<i>Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.</i>
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Baik	<i>Penggunaan laba dan pembagian dividen telah memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		2 Indikator	



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

Indikator dengan nilai Baik:	7 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 1. Aspek Pemegang Saham
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/ atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.</p> <p>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.</p> <p>2. Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
2)	Faktor Negatif
	<p>PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif dalam penerapan tata kelola.</p>
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Pelaksanaan komunikasi terkait visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau</p>



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

	<p>Dewan Komisaris dinilai baik</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris dilakukan minimal satu kali sebulan sehingga dinilai baik.3. Penilaian terhadap indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, yang dimiliki BPR adalah baik.4. Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, dengan penilaian sangat baik.5. Pengambilan keputusan melalui RUPS telah memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil. Dalam pelaksanaan aksi korporasi, perlakuan yang adil diantaranya dalam hal pembagian Dividen yang dilaksanakan secara proporsional berdasarkan setoran modal.2. Perkembangan kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.3. Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.4. Penggunaan laba dan pembagian dividen telah memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Telah Terpenuhi	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi Jumlah Direksi 3 (tiga) orang yaitu Direktur Utama, Direktur Pemasaran, dan Direktur Umum dan Kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan 1.Sarti., S.E.,M.M sebagai Direktur Utama bertempat tinggal di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. 2. Joko Santoso.,S.E sebagai Direktur Pemasaran bertempat tinggal di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. 3. Yani Harmini.,SP sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan bertempat tinggal di Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Seluruh anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank, dan/ atau lembaga lain (Partai Politik atau Organisasi Kemasyarakatan)
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Telah Terpenuhi	Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembedangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Telah Terpenuhi	<i>Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yaitu Peraturan Direksi Nomor 04/ VI/ Per.Dir/2022 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang memuat tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; pengorganisasian BPR dan pembedangan tugas Direksi; dan prosedur pengambilan keputusan Direksi.</i>
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Telah Terpenuhi	<i>Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR yaitu Peraturan Direksi Nomor 01/ I/ Per.Dir/2024 Tentang SOP Remunerasi</i>
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	<i>Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

B. Proses Penerapan Tata Kelola			
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Sangat Baik	<i>Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.</i>
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Baik	<i>Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi</i>
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain.	Cukup Baik	<i>Secara umum Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain. Namun terdapat beberapa temuan pemeriksaan OJK yang masih dalam proses tindak lanjut</i>
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Baik	<i>Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.</i>
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Baik	<i>Pengambilan keputusan Direksi yang diambil telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja</i>
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Baik	<i>Setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.</i>



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Sangat Baik	<p><i>Direksi tidak menggunakan Perusahaan untuk kepentingan pribadi. Segala remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi sesuai dengan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah.</i><i>2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.</i><i>3. Pemberian Remunerasi dan Fasilitas lainnya tersebut ditetapkan berdasarkan RUPS- LB tanggal 29 November 2024</i>
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Baik	<p><i>Direksi mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan oleh OJK, Perbarindo, Perbamidea maupun lembaga lain. Direksi juga menyelenggarakan pendidikan dan sosialisasi kebijakan secara mandiri yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Disamping itu Direksi juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Pengurus dan Pejabat Eksekutif setiap sebulan sekali, untuk sharing informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, pada seluruh tingkatan atau jenjang, dan semua kegiatan tersebut didokumentasikan dengan baik.</i></p>



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR.	Baik	<i>Implementasi indikator Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR, di BPR menunjukkan kondisi baik.</i>
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Baik	<i>Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</i>
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Cukup Baik	<i>Direksi telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara cukup konsisten.</i>
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Baik	<i>Direksi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, yaitu Peraturan Direksi Nomor 01/I/Per.Dir/2024 Tentang SOP Remunerasi. Secara berkala Direksi melakukan Perubahan struktur Gaji/ Penghasilan Pegawai dengan Surat Keputusan Direksi.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Sangat Baik	<i>Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.</i>
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Cukup Baik	<i>Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR dengan penilaian cukup baik</i>
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Baik	<i>Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.</i>
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Baik	<i>Hasil rapat Direksi didokumentasikan dalam bentuk Notulen dan diarsipkan. Dissenting Opinion (perbedaan pendapat) sejauh ini belum ada, sedangkan jika ada perbedaan pendapat dalam rapat, selalu dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat.</i>



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Baik	<i>Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan tercapainya semua komponen RBB dan penurunan NPL dari semester sebelumnya, yang dinilai baik.</i>
28	Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	<i>Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		9 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		13 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)	



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

Jl. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

Kesimpulan Penilaian Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Nilai Faktor

Nilai 2 (Memadai)

Penjelasan Nilai Faktor

Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:

- a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.
- b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik.
- c. Direksi telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
- d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.
- e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif.

No

Analisa Faktor Positif dan Negatif

A. Struktur dan Infrastruktur

1) Faktor Positif

1. Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi Jumlah Direksi 3 (tiga) orang yaitu Direktur Utama, Direktur Pemasaran, dan Direktur Umum dan Kepatuhan
2. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan 1.Sarti., S.E.,M.M sebagai Direktur Utama bertempat tinggal di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri.
3. Joko Santoso.,S.E sebagai Direktur Pemasaran bertempat tinggal di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri.
4. Yani Harmini.,SP sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan bertempat tinggal di Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri.
5. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank, dan/atau lembaga lain (Partai Politik atau Organisasi Kemasyarakatan)
6. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
7. Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, yang dimiliki BPR adalah telah



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

	<p>terpenuhi.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yaitu Peraturan Direksi Nomor 04/ VI/ Per.Dir/2022 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang memuat tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan prosedur pengambilan keputusan Direksi.9. Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR yaitu Peraturan Direksi Nomor 01/I/Per.Dir/2024 Tentang SOP Remunerasi.10. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.11. Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan, dengan penilaian telah terpenuhi. Dibuktikan dengan:12. Sarti, SE.MM, berdasarkan Salinan Keputusan OJK Nomor KEP-33/ KO.0301/2021 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudari Sarti Selaku Calon Anggota Direksi (Direktur Utama) PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda). Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Utama PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda) berdasarkan RUPS-LB tanggal 27 April 2021 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat Nomor KP-01/806/V/SU/2021 serta telah ditata usahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-806/ KO.0301/2021. Dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 27 April 2021 sampai dengan 27 April 2026.13. Yani Harmini, SP, berdasarkan Salinan Keputusan OJK Nomor KEP-3/ KO.0301/2022 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudari Yani Harmini Selaku Calon Anggota Direksi (Direktur Umum dan Kepatuhan) PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda). Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda) berdasarkan RUPS-LB tanggal 27 Januari 2022 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat Nomor KP 01/147/I/SU/2022 serta telah ditata usahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-461/ KO.0301/2022. Dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan 27 Januari 2027.14. Joko Santoso, SE, berdasarkan Salinan Keputusan OJK Nomor KEP-26/ KO.1301/2024 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Joko Santoso Selaku Calon Anggota Direksi (Direktur Pemasaran) PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda). Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Pemasaran PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) berdasarkan RUPS-LB tanggal 31 Mei dan telah dilaporkan OJK melalui apolo serta telah ditata usahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-379/ KO.1301/2024. Dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 31 Mei 2024 s.d 31 Mei 2029.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.2. Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

3. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.
4. Pengambilan keputusan Direksi yang diambil telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
5. Setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
6. Direksi tidak menggunakan Perusahaan untuk kepentingan pribadi. Segala remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi sesuai dengan: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah. b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan. c. Pemberian Remunerasi dan Fasilitas lainnya tersebut ditetapkan berdasarkan RUPS-LB tanggal 29 November 2024.
7. Direksi mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan oleh OJK, Perbarindo, Perbamida maupun lembaga lain. Direksi juga menyelenggarakan pendidikan dan sosialisasi kebijakan secara mandiri yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Disamping itu Direksi juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Pengurus dan Pejabat Eksekutif setiap sebulan sekali, untuk sharing informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, pada seluruh tingkatan atau jenjang, dan semua kegiatan tersebut didokumentasikan dengan baik.
8. Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) melalui website internal yang mudah diakses oleh seluruh pegawai. Semua kewajiban dan hak pegawai dituangkan dalam :
 - a. Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri berdasarkan surat nomor 524 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda).
 - b. Peraturan Direksi Nomor 08/ IX/ Per.Dir/2022 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Disiplin Pegawai.
 - c. Peraturan Direksi Nomor 09/ IX/ Per.Dir/2022 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Mutasi, Alih Status, Promosi Dan Demosi Pegawai.
 - d. Peraturan Direksi Nomor 10/IX/Per.Dir/2022 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Cuti Pegawai.
 - e. Peraturan Direksi Nomor 12/ Per.Dir/ IX/2022 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Perkawinan dan Perceraian Pegawai
 - f. Peraturan Direksi Nomor 17/Per.Dir/IX/2022 Tentang Standar Operasional dan Prosedur WFH
 - g. Peraturan Direksi No 18/Per.Dir/IX/2022 Tentang Pencabutan Peraturan Direksi Nomor 03/V/ Per.Dir/2020 tentang Pengelolaan SDM
 - h. Peraturan Direksi No 0/ Per.Dir/ I/2023 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Aplikasi Sistem Kehadiran Pegawai (BPRSIKAP)
 - i. Peraturan Direksi No 01/Per.Dir/I/2024 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Remunerasi Pegawai
 - j. Peraturan Direksi No 06/Per.Dir/III/2024 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Tata Kerja Pegawai
 - k. Peraturan Direksi No 07/ Per.Dir/ IV/2024 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

	<p>Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia</p> <p>l. Peraturan Direksi No 08/Per.Dir/IV/2024 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Penilaian Kinerja Individu (Key Performance Indicators – KPI)</p> <p>m. Peraturan Direksi Nomor 10/ Per.Dir/ VI/2022 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Sistem Pengadaan Dan Pengangkatan Tenaga Kontrak Dan Alih Daya.</p> <p>n. Peraturan Direksi Nomor 06/IX/Per.Dir/2022 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Sistem Rekrutmen, Pengangkatan, Kepangkatan dan Pemberhentian Pegawai.</p> <p>9. Implementasi indikator Direksi mengungkapkan: a. seluruh anggota direksi tidak memiliki saham pada BPR dan perusahaan lain; dan b. seluruh anggota direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR, sehingga menunjukkan kondisi baik.</p> <p>10. Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>11. Direksi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, yaitu Peraturan Direksi Nomor 01/I/ Per.Dir/2024 Tentang SOP Remunerasi. Secara berkala Direksi melakukan Perubahan struktur Gaji/ Penghasilan Pegawai dengan Surat Keputusan Direksi.</p>
2)	Faktor Negatif
	<p>1. Secara umum Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain. Namun terdapat beberapa temuan pemeriksaan OJK yang masih dalam proses tindak lanjut.</p> <p>2. Direksi telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara cukup konsisten.</p>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>2. Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.</p> <p>3. Hasil rapat Direksi didokumentasikan dalam bentuk Notulen dan diarsipkan. Dissenting Opinion (perbedaan pendapat) sejauh ini belum ada, sedangkan jika ada perbedaan pendapat dalam rapat, selalu dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat.</p> <p>4. Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan tercapainya semua komponen RBB dan penurunan NPL dari semester sebelumnya, yang dinilai baik.</p> <p>5. Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p>
2)	Faktor Negatif
	<p>1. Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR dengan penilaian cukup baik</p>



Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Belum Terpenuhi	Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris belum sesuai dengan ketentuan yaitu paling sedikit 3 (tiga) orang. Saat ini BPR hanya memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan salah satunya menjabat sebagai Komisaris Utama. Sehingga masih terdapat kekosongan yaitu jabatan Komisaris Independen dikarenakan mengundurkan diri. Saat ini sedang dalam proses rekrutmen dan akan terpenuhi pada semester 1 tahun 2025
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Sesuai dengan ketentuan, semua Anggota Dewan Komisaris berdomisili dalam Provinsi yang sama: a. Andre Wahyu Yudhantoro, S.E.,M.M Sebagai Komisaris Utama berdomisili di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. b. FX Pranata A.P.,M.Hum Sebagai Komisaris berdomisili di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat, yang tertuang dalam Peraturan Dewan Komisaris Nomor 01/ VII/ Per.Kom- WNG /2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS lainnya. Dewan Komisaris tidak merangkap Jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR/ BPRS dan/atau Bank Umum.
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Anggota Dewan Komisaris atau Direksi.



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Belum Terpenuhi	Terdapat kekosongan Komisaris Independen dikarenakan mengundurkan diri dan saat ini sedang dalam proses rekrutmen dan akan terpenuhi pada semester 1 tahun 2025
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Telah Terpenuhi	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan diangkat melalui RUPS-LB : 1. Andre Wahyu Yudhantoro, S.E.,M.M, berdasarkan Surat Kepala OJK Nomor S-220/ KO.0301/2023/2023 Tanggal 30 Maret 2023 hal Keputusan persetujuan atas pencalonan Dewan Komisaris (komisaris utama) PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) dan Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-17/ KO.0301/2023 Tanggal 29 Maret 2023 Tentang kasil penilaian kemampuan dan kepatutan Sdr Andre Wahyu Yudhantoro, S.E,M.M selaku calon Komisaris Utama PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Kabupaten Wonogiri serta RUPSLB Tanggal 5 April 2023 dengan masa jabatan tanggal 26 April 2023 sd 26 April 2027 dan telah dilaporkan ke OJK melalui APOLO 2. FX Pranata A.P.,M.Hum berdasarkan Kep-02/ KO.0301/2023 tanggal 10-01-2023 Dan berdasarkan BA RUPS LB Nomor 63 tanggal 24 Januari 2023 dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 24 Januari 2023 sd 24 Januari 2027 dan telah dilaporkan ke OJK melalui APOLO.
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Kabijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah ditetapkan pada RUPS- LB tanggal 29 November 2024
B. Proses Penerapan Tata Kelola			



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Baik	<i>Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.</i>
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Baik	<i>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, pada BPR berada dalam kondisi baik.</i>
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Sangat Baik	<i>Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</i>
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Baik	<i>Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain. Hasil pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan pemeriksaan disampaikan oleh Direksi pada rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat pengurus.</i>
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Baik	<i>Dewan Komisaris secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.</i>



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Baik	Indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, terakhir dilakukan evaluasi pada tahun 2022.
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Baik	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Baik	Dewan Komisaris melaksanakan rapat rutin dengan Direksi secara berkala dalam upaya pemantauan kinerja Direksi dan dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan komisaris dimana pada Tahun 2024 mengadakan rapat sebanyak 9 kali
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Sangat Baik	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, dengan penilaian baik.
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Baik	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang ditelaah ditetapkan dengan RUPS- LB tanggal 29 November 2024
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Cukup Baik	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan cukup baik
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Baik	Dewan Komisaris secara berkala telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Baik	<i>Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.</i>
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Baik	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai baik.</i>
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Sangat Baik	<i>Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.</i>
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	<i>Dewan Komisaris dalam menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</i>
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Baik	<i>Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan tercapainya semua komponen RBB dan penurunan NPL menjadi 8,87% dan KKR 28,56% dari semester sebelumnya, yang dinilai baik.</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		6 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		2 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Sebagian	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		3 Indikator	



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

Jl. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

Indikator dengan nilai Baik:	14 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 4 (Kurang Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
Nilai Faktor
Nilai 4 (Kurang Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Sesuai dengan SE OJK No. 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan yaitu kekosongan Komisaris Independen. Meskipun terdapat kekosongan Komisaris Independen, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai yang ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik yang ditandai dengan tercapainya seluruh rencana bisnis, penurunan NPL serta tidak terdapat kasus fraud. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Dewan Komisaris memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>b. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dapat terlaksana dengan baik.</p> <p>c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</p> <p>d. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">Sesuai dengan ketentuan, semua Anggota Dewan Komisaris berdomisili dalam Provinsi yang sama: a. Andre Wahyu Yudhantoro, S.E.,M.M Sebagai Komisaris Utama berdomisili di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. b. FX Pranata A.P.,M.Hum Sebagai Komisaris berdomisili di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa TengahDewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat, yang tertuang dalam Peraturan Dewan Komisaris Nomor 01/ VII/ Per.Kom-WNG /2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS lainnya. Dewan Komisaris tidak merangkap Jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR/BPRS dan/atau Bank Umum.



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

Jl. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

	<ol style="list-style-type: none">Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Anggota Dewan Komisaris atau Direksi.Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan diangkat melalui RUPS-LB : a. Andre Wahyu Yudhantoro, S.E.,M.M, berdasarkan Surat Kepala OJK Nomor S-220/KO.0301/2023 Tanggal 30 Maret 2023 hal Keputusan persetujuan atas pencalonan Dewan Komisaris (komisaris utama) PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) dan Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK Nomor KEP-17/ KO.0301/2023 Tanggal 29 Maret 2023 Tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Sdr Andre Wahyu Yudhantoro, S.E.M.M selaku calon Komisaris Utama PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Kabupaten Wonogiri serta RUPSLB Tanggal 5 April 2023 dengan masa jabatan tanggal 26 April 2023 sd 26 April 2027 dan telah dilaporkan ke OJK melalui APOLO b. FX Pranata A.P.,M.Hum berdasarkan Surat Kepala OJK Nomor S-37/ KO.0301/2023 Tanggal 10 Januari 2023 hal Keputusan atas Pencalonan Anggota Dewan Komisaris PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) dan Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK Nomor KEP-02/ KO.0301/2023 tanggal 10 Januari 2023 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr FX Pranata selaku Calon Anggota Dewan Komisaris (Komisaris) PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) dan berdasarkan RUPSLB Tanggal 24 Januari 2023 dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 24 Januari 2023 sd 24 Januari 2027 dan telah dilaporkan ke OJK melalui APOLO.Kabijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah ditetapkan pada RUPS-LB tanggal 29 November 2024
2)	Faktor Negatif
	<ol style="list-style-type: none">Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris belum sesuai dengan ketentuan yaitu paling sedikit 3 (tiga) orang. Saat ini BPR hanya memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan salah satunya menjabat sebagai Komisaris Utama. Sehingga masih terdapat kekosongan yaitu jabatan Komisaris Independen dikarenakan mengundurkan diri. Saat ini sedang dalam proses rekrutmen dan akan terpenuhi pada semester 1 tahun 2025Terdapat kekosongan Komisaris Independen dikarenakan mengundurkan diri dan saat ini sedang dalam proses rekrutmen dan akan terpenuhi pada semester 1 tahun 2025
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS.Hasil evaluasi menunjukkan indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, pada BPR berada dalam kondisi baik.Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain. Hasil pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan pemeriksaan disampaikan oleh Direksi pada rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat pengurus.Dewan Komisaris secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

	<ol style="list-style-type: none">6. Indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, terakhir dilakukan evaluasi pada tahun 2022.7. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.8. Dewan Komisaris melaksanakan rapat rutin dengan Direksi secara berkala dalam upaya pemantauan kinerja Direksi dan dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan komisaris dimana pada Tahun 2024 mengadakan rapat sebanyak 9 kali9. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.10. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, dengan penilaian baik.11. Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah ditetapkan dengan RUPS- LB tanggal 29 November 202412. Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan cukup baik13. Dewan Komisaris secara berkala telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai baik.3. Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.4. Dewan Komisaris dalam menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.5. Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan tercapainya semua komponen RBB dan penurunan NPL menjadi 8,87% dan KKR 28,56% dari semester sebelumnya, yang dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sebagian Terpenuhi	BPR memiliki komite Direksi yaitu komite kredit, Satker Kepatuhan dan Manajemen risiko yang melaksanakan fungsi Komite Manajemen Risiko serta memiliki komite Dewan Komisaris yaitu komite pemantau risiko tetapi belum membentuk komite lainnya, berdasarkan ketentuan POJK No 9 Tahun 2024 BAB XVIII Ketentuan Peralihan BPR diberikan jangka waktu untuk memenuhi ketentuan paling lambat tanggal 31 Desember 2025
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing- masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sebagian Terpenuhi	BPR memiliki memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk Direksi, namun belum memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk komite Dewan Komisaris.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Baik	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Satker Kepatuhan dan Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit,
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Tidak Baik	BPR belum membentuk komite audit, berdasarkan ketentuan POJK No 9 Tahun 2024 BAB XVIII Ketentuan Peralihan BPR diberikan jangka waktu untuk memenuhi ketentuan paling lambat tanggal 31 Desember 2025
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Baik	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Tidak Baik	<i>BPR belum membentuk komite remunerasi dan nominasi, berdasarkan ketentuan POJK No 9 Tahun 2024 BAB XVIII Ketentuan Peralihan BPR diberikan jangka waktu untuk memenuhi ketentuan paling lambat tanggal 31 Desember 2025</i>
7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Cukup Baik	<i>1. Anggota Komite Pemantau Risiko melakukan tugas dan tanggungjawab pengawasan bersama dengan Ketua Komite yaitu Komisaris Independen sehingga beberapa rapat dilakukan bersama dengan rapat Pengurus. 2. Anggota Komite Kredit menjalankan tugasnya secara efektif termasuk menyelenggarakan rapat komite yang dilakukan bersama direksi sebagai pemutus kredit</i>
8	Masing- masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Kurang Baik	<i>Masing- masing komite Direksi mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten, namun Komite Dewan komisaris belum menyusun pedoman dan tata tertib kerja.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Baik	<i>Satker kepatuhan dan Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan Komite Kredit memberikan rekomendasi kepada direksi terhadap pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.</i>
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Cukup Baik	<i>Komite pemantau risiko telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait fungsi manajemen risiko dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris. Tetapi BPR belum membentuk komite dewan komisaris yang lain</i>
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Baik	<i>Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.</i>

**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Sebagian
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	2 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 4 (Kurang Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
Nilai Faktor	
Nilai 4 (Kurang Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>BPR belum memiliki Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi namun bukan merupakan pelanggaran ketentuan karena batas akhir pembentukan komite Desember 2025. Anggota komite Direksi yaitu Komite Kredit dan Satker kepatuhan dan Manajemen Risiko melaksanakan proses penerapan tata kelola dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Masing-masing komite yang sudah terbentuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <p>b. Komite Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite namun Komite Dewan Komisaris belum memiliki tata tertib kerja Komite. Namun demikian pelaksanaan tugas dan tanggungjawab seluruh komite yang sudah terbentuk dapat berjalan dengan baik. Kekuranglengkapan tata tertib kerja komite akan segera dipenuhi.</p>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) belum memiliki komite lengkap, namun tidak melanggar ketentuan karena kewajiban pemenuhan komite paling lambat Desember 2025. Disamping hal tersebut Komite yang sudah terbentuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik.
2)	Faktor Negatif
	<ol style="list-style-type: none">1. BPR memiliki komite Direksi yaitu komite kredit, Satker Kepatuhan dan Manajemen risiko yang melaksanakan fungsi Komite Manajemen Risiko serta memiliki komite Dewan Komisaris yaitu komite pemantau risiko tetapi belum membentuk komite lainnya, berdasarkan ketentuan POJK No 9 Tahun 2024 BAB XVIII Ketentuan Peralihan BPR diberikan jangka waktu untuk memenuhi ketentuan paling lambat tanggal 31 Desember 20252. BPR memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk Direksi, namun belum memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk komite Dewan Komisaris.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Satker Kepatuhan dan Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit,2. Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko3. 1. Anggota Komite Pemantau Risiko melakukan tugas dan tanggungjawab pengawasan bersama dengan Ketua Komite yaitu Komisaris Independen sehingga beberapa rapat dilakukan bersama dengan rapat Pengurus.4. Anggota Komite Kredit menjalankan tugasnya secara efektif termasuk menyelenggarakan rapat komite yang dilakukan bersama direksi sebagai pemutus kredit.
2)	Faktor Negatif
	<ol style="list-style-type: none">1. BPR belum membentuk komite audit, berdasarkan ketentuan POJK No 9 Tahun 2024 BAB XVIII Ketentuan Peralihan BPR diberikan jangka waktu untuk memenuhi ketentuan paling lambat tanggal 31 Desember 20252. BPR belum membentuk komite remunerasi dan nominasi, berdasarkan ketentuan POJK No 9 Tahun 2024 BAB XVIII Ketentuan Peralihan BPR diberikan jangka waktu untuk memenuhi ketentuan paling lambat tanggal 31 Desember 20253. Masing-masing komite Direksi mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten, namun Komite Dewan komisaris belum menyusun pedoman dan tata tertib kerja.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Satker kepatuhan dan Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan Komite Kredit memberikan rekomendasi kepada direksi terhadap pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.2. Komite pemantau risiko telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait fungsi manajemen risiko dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris. Tetapi BPR belum membentuk komite dewan komisaris yang lain.3. Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.
2)	Faktor Negatif



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Telah Terpenuhi	BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 39/ V/ Per.Dir/2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Baik	Belum pernah terjadi benturan kepentingan dalam operasional Perusahaan, namun dalam hal terjadi benturan kepentingan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Baik	Belum pernah terjadi benturan kepentingan dalam operasional BPR, namun dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Baik	Di tahun 2024 tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Perusahaan.
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Baik	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:			1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:			0 Indikator

**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR telah memiliki dan menginisiasi kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan.</p> <p>b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik.</p> <p>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara baik.</p>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 39/V/Per.Dir/2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

1)	Faktor Positif
	1. Belum pernah terjadi benturan kepentingan dalam operasional Perusahaan, namun dalam hal terjadi benturan kepentingan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Belum pernah terjadi benturan kepentingan dalam operasional BPR, namun dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. 2. Di tahun 2024 tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Perusahaan. 3. BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR sudah memiliki Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, tidak merangkap sebagai Direktur Utama, tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana dan mampu bekerja secara independen.
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah dibentuk sejak bulan Agustus 2019 yang bekerja secara independen terhadap operasional Perusahaan.
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Telah Terpenuhi	Satuan Kerja Kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan berupa Peraturan Direksi Nomor 43/ VI/ Per.Dir/2020 tentang Tentang Pedoman Penerapan Fungsi Kepatuhan.
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah Terpenuhi	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, termuat dalam Peraturan Direksi No 06/Per.Dir/III/2024 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Tata Kerja Pegawai
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Cukup Baik	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. Namun mitigasi risiko dalam proses perkreditan belum dilakukan secara optimal



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

Jl. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Cukup Baik	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun belum terdapat kertas kerja yang digunakan untuk memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR sehingga tidak terdapat dokumentasi yang menunjukkan bahwa proses pemantauan tersebut telah dilaksanakan secara efektif
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Baik	Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, termuat dalam Peraturan Direksi No 06/ Per.Dir/ III/2024 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Tata Kerja Pegawai

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Baik	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan dari tahun sebelumnya.
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	3 Indikator



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

Indikator dengan nilai Cukup Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.</p> <p>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</p> <p>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan/ atau menginikasikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. BPR sudah memiliki Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, tidak merangkap sebagai Direktur Utama, tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana dan mampu bekerja secara independen.2. Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah dibentuk sejak bulan Agustus 2019 yang bekerja secara independen terhadap operasional Perusahaan.3. Satuan Kerja Kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan berupa Peraturan Direksi Nomor 43/ VI/Per.Dir/2020 tentang Tentang Pedoman Penerapan Fungsi Kepatuhan.4. BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.5. Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, termuat dalam Peraturan Direksi No 06/Per.Dir/III/2024 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Tata Kerja Pegawai



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, termuat dalam Peraturan Direksi No 06/Per.Dir/III/2024 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Tata Kerja Pegawai
2)	Faktor Negatif
	1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. Namun mitigasi risiko dalam proses perkreditan belum dilakukan secara optimal 2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun belum terdapat kertas kerja yang digunakan untuk memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR sehingga tidak terdapat dokumentasi yang menunjukkan bahwa proses pemantauan tersebut telah dilaksanakan secara efektif
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan dari tahun sebelumnya. 2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggungjawab terhadap fungsi Audit Intern,
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginik pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi Auditor Intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 15/ II/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern.
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Telah Terpenuhi	Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, independen terhadap satuan kerja operasional. Hal ini tercermin dari Struktur Organisasi dimana SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan tidak merangkap jabatan dengan Satuan Kerja Operasional lainnya, serta tidak ada perintah kerja dari Direksi untuk melaksanakan fungsi operasional.
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Telah Terpenuhi	Sebagaimana dalam Struktur Organisasi yang sudah ditetapkan, SKAI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah Terpenuhi	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Baik	<i>Perusahaan sudah menerapkan, aspek dan unsur kegiatan audit intern sebagaimana ketentuan antara lain:</i> <i>a. Perencanaan audit tahunan</i> <i>b. Penunjukan tenaga audit</i> <i>c. Rencana audit</i> <i>d. Strategi audit</i> <i>e. Pelaksanaan audit</i> <i>f. Konfirmasi hasil audit</i> <i>g. Pembahasan hasil audit</i> <i>h. Monitoring dll.</i>
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Sangat Baik	<i>Telah dilaksanakan kaji ulang dari pihak ekstern atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern periode tahun 2022 dan telah dilaporkan kepada OJK dengan penilaian secara umum telah memenuhi fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab SKAI.</i>
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Baik	<i>Pelaksanaan audit intern sudah melalui tahap-tahap yang mencakup :</i> <i>a. Persiapan Audit.</i> <i>b. Penyusunan Program Audit.</i> <i>c. Pelaksanaan Audit.</i> <i>d. Pelaporan Hasil Audit.</i> <i>Tindak lanjut pasca audit telah dipantau sesuai komitmen auditee</i>
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Cukup Baik	<i>Ketua SKAI sudah memiliki Sertifikat dari LPS PRATAMA di bidang Jasa Pengelola Keuangan Pada Unit Kompetensi Okupasi Auditor dan dinyatakan Kompeten.</i> <i>Namun Anggota SKAI yang lain belum memiliki Sertifikasi.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Kurang Baik	<i>Berdasarkan hasil temuan pemeriksaan OJK, proses perencanaan audit intern tahun 2024 oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) belum memuat cakupan sebagaimana Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/ SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat. dan Audit intern belum pernah menyusun audit program sebelum melakukan pemeriksaan ke unit atau satuan kerja yang akan dijadikan obyek audit (auditee).</i>



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu.	Baik	<i>Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, selalu menyampaikan Laporan Pelaksanaan Audit Intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, serta menyampaikan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		5 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)	



Kesimpulan Penilaian Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginisiasi pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. BPR telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggungjawab terhadap fungsi Audit Intern,2. Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi Auditor Intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 15/ II/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern.3. Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, independen terhadap satuan kerja operasional. Hal ini tercermin dari Struktur Organisasi dimana SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan tidak merangkap jabatan dengan Satuan Kerja Operasional lainnya, serta tidak ada perintah kerja dari Direksi untuk melaksanakan fungsi operasional.4. Sebagaimana dalam Struktur Organisasi yang sudah ditetapkan, SKAI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.5. BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Perusahaan sudah menerapkan, aspek dan unsur kegiatan audit intern sebagaimana ketentuan antara lain: a. Perencanaan audit tahunan b. Penunjukan tenaga audit c. Rencana audit d. Strategi audit e. Pelaksanaan audit f. Konfirmasi hasil audit g. Pembahasan hasil audit h. Monitoring dll.2. Telah dilaksanakan kaji ulang dari pihak ekstern atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern periode tahun 2022 dan telah dilaporkan kepada OJK dengan penilaian



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

	<p>secara umum telah memenuhi fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab SKAI.</p> <p>3. Pelaksanaan audit intern sudah melalui tahap-tahap yang mencakup : a. Persiapan Audit. b. Penyusunan Program Audit. c. Pelaksanaan Audit. d. Pelaporan Hasil Audit. Tindak lanjut pasca audit telah dipantau sesuai komitmen auditee</p>
2)	Faktor Negatif
	<p>1. Proses perencanaan audit intern tahun 2024 oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) belum memuat cakupan sebagaimana Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7 / SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.</p> <p>2. Audit intern belum pernah menyusun audit program sebelum melakukan pemeriksaan ke unit atau satuan kerja yang akan dijadikan obyek audit (auditee).</p>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, selalu menyampaikan Laporan Pelaksanaan Audit Intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, serta menyampaikan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>
2)	Faktor Negatif
	<p>PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.</p>



Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Telah Terpenuhi	<p>Penugasan Audit kepada kantor KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan untuk melakukan Audit atas laporan keuangan Perusahaan tahun 2024, tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Audit Atas Laporan Keuangan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Nomor 024.231/ KAP.RMR/ SP/ X/2024 Dan KP-01/61/ PKS/ X/2024 dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan SE OJK No.36 /SEOJK.03/2017.</p> <p>Dalam melaksanakan pekerjaannya KAP menggunakan Standar Profesional Akuntan Publik, serta apabila pemeriksaan telah selesai akan menyampaikan laporan hasil audit dan Management Letter kepada Perusahaan serta OJK.</p>
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Sangat Baik	<p>KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan berdasar persetujuan RUPS tanggal 11 Oktober 2024 ditunjuk untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2024.</p> <p>KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Akuntan Publik dengan Nomor Register AP No. 0182.2. Nomor Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik: STTD.AP00004/ PB.122/2017.3. Nomor Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik: STTD.KAP00020/PM.22/2017.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Baik	<p>a. Audit KAP posisi laporan tahun 2023 telah dilakukan oleh KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi dan Rekan dan telah dilaporkan OJK dengan Nomor Surat KP-01/266/ II/ SU/2024 pada tanggal 19 Februari 2024.</p> <p>b. Untuk audit tahun 2024 masih dalam proses pemeriksaan.</p>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			

**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Baik	<i>Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.</i>
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	<i>Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern**Nilai Faktor****Nilai 2 (Memadai)****Penjelasan Nilai Faktor**

Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, hasil audit menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR.

**PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)**

Jl. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Penugasan Audit kepada kantor KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan untuk melakukan Audit atas laporan keuangan Perusahaan tahun 2024, tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Audit Atas Laporan Keuangan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Nomor 024.231/KAP.RMR/SP/X/2024 Dan KP-01/61/PKS/X/2024 dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan SE OJK No.36 /SEOJK.03/2017.</p> <p>Dalam melaksanakan pekerjaannya KAP menggunakan Standar Profesional Akuntan Publik, serta apabila pemeriksaan telah selesai akan menyampaikan laporan hasil audit dan Management Letter kepada Perusahaan serta OJK.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan berdasar persetujuan RUPS tanggal 11 Oktober 2024 ditunjuk untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2024. KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan :</p> <p>2. Akuntan Publik dengan Nomor Register AP No. 0182.</p> <p>3. Nomor Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik: STTD.AP00004/PB.122/2017.</p> <p>4. Nomor Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik: STTD.KAP00020/PM.22/2017.</p> <p>5. a. Audit KAP posisi laporan tahun 2023 telah dilakukan oleh KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi dan Rekan dan telah dilaporkan OJK dengan Nomor Surat KP-01/266/II/SU/2024 pada tanggal 19 Februari 2024. b. Untuk audit tahun 2024 masih dalam proses pemeriksaan.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.</p> <p>2. Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sudah dibentuk sejak bulan Agustus 2019 yang bekerja Independen terhadap operasional BPR yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Telah Terpenuhi	Perusahaan telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. Untuk Penetapan Limit Risiko tertuang dalam Surat Edaran Direksi Nomor KP-01/09/ VII/ SE/2024 Tentang Tingkat Risiko (Risk Appetite) dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance).
3	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah Terpenuhi	Perusahaan telah memiliki kebijakan dan Prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	SKKMR yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Baik	<i>Direksi telah menyusun kebijakan dan Pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</i>
6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Baik	<i>Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yaitu Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</i>
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Baik	<i>BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko di antaranya proses persetujuan kredit mempertimbangkan pendapat SKKMR, mempelajari dan mengevaluasi Laporan Profil Risiko dari Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta dalam hal penerbitan produk baru mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi produk baru tersebut.</i>



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Baik	<i>BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.</i>
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain saat melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah selalu dilakukan CDD</i>
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Baik	<i>BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh dengan cara melakukan pemantauan terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi diantaranya dengan melakukan perbaikan/pengkinian SOP, sosialisasi penerapan manajemen risiko kepada seluruh pegawai dan penilaian profil risiko terhadap masing-masing jenis risiko secara berkala.</i>



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR telah berupaya menerapkan Manajemen Risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana laporan profil risiko yang telah disampaikan ke OJK. Perusahaan cukup mampu melakukan pengendalian Risiko dengan kondisi sebagai berikut: 1. Risiko kredit, terjadi penurunan NPL dan KKR dari sementer sebelumnya. 2. Risiko likuiditas, selalu memantau rasio LDR, 3. Risiko operasional, masih terdapat kelemahan terutama proses pengikatan agunan. 4. Risiko kepatuhan, masih adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku antara lain kelemahan proses restrukturisasi, penyelesaian kredit bermasalah, dan kesalahan laporan bulanan 5. Risiko reputasi, terkelola dengan baik, dalam tahun 2024 tidak terdapat pemberitaan negatif mengenai BPR dan tidak ditemukan adanya pengaduan nasabah 6. Risiko stratejik, pencapaian RBB tahun 2024 untuk semua komponen telah tercapai</i>
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Baik	<i>Perusahaan telah mempunyai sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh dengan mempergunakan jasa vendor PT USSI PINBUK PRIMA SOFTWARE sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor KP-01/05.B/ PKS/ I/2023 dan Nomor 026/PKS/USSI/I/2023.</i>
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Baik	<i>Direksi telah melakukan upaya pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi di antaranya melalui pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan- pelatihan berkaitan dengan manajemen risiko termasuk mengirim Pejabat Struktural untuk mengikuti pendidikan bersertifikasi Manajemen Risiko secara bertahap.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Baik	<i>BPR telah menyusun dan melaporkan Laporan Profil Risiko Setiap Semester kepada OJK, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.</i>
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR telah menyusun dan melaporkan produk dan aktivitas baru kepada OJK. diantaranya :</i> 1. Produk WAFINS yang diterbitkan tanggal 1 Oktober 2024 dan telah dilaporkan pada OJK 2. Produk VIRTUAL ACCOUNT dengan Bank Jateng yang diterbitkan tanggal 16 Desember 2024 dan telah dilaporkan pada OJK
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Baik	<i>BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		14 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)	



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

Kesimpulan Penilaian Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: 1) peringkat risiko sedang; 2) tidak terdapat fraud; dan/ atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah. Terdapat peningkatan penilaian profil risiko berdasarkan penilaian OJK.</p> <p>b. BPR telah memiliki dan menginikasikan pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut</p> <p>c. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>	
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sudah dibentuk sejak bulan Agustus 2019 yang bekerja Independen terhadap operasional BPR yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme slesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.2. Perusahaan telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. Untuk Penetapan Limit Risiko tertuang dalam Surat Edaran Direksi Nomor KP-01/09/ VII/ SE/2024 Tentang Tingkat Risiko (Risk Appetite) dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance).3. Perusahaan telah memiliki kebijakan dan Prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. SKKMR yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

Jl. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

	<ol style="list-style-type: none">2. Direksi telah menyusun kebijakan dan Pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.3. Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yaitu Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.4. BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko di antaranya proses persetujuan kredit mempertimbangkan pendapat SKKMR, mempelajari dan mengevaluasi Laporan Profil Risiko dari Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta dalam hal penerbitan produk baru mempertimbangkan faktor- faktor risiko yang mempengaruhi produk baru tersebut.5. BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.6. BPR telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain saat melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah selalu dilakukan CDD7. BPR telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.8. BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh dengan cara melakukan pemantauan terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi diantaranya dengan melakukan perbaikan/ pengkinian SOP, sosialisasi penerapan manajemen risiko kepada seluruh pegawai dan penilaian profil risiko terhadap masing-masing jenis risiko secara berkala.9. BPR telah berupaya menerapkan Manajemen Risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana laporan profil risiko yang telah disampaikan ke OJK. Perusahaan cukup mampu melakukan pengendalian Risiko namun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapatkan perhatian10. Perusahaan telah mempunyai sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh dengan mempergunakan jasa vendor PT USSI PINBUK PRIMA SOFTWARE sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor KP-01/05.B/ PKS/I/2023 dan Nomor 026/PKS/USSI/I/2023.11. Direksi telah melakukan upaya pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi di antaranya melalui pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan- pelatihan berkaitan dengan manajemen risiko termasuk mengirim Pejabat Eksekutif untuk mengikuti pendidikan bersertifikasi Manajemen Risiko secara bertahap.
2)	Faktor Negatif
	Belum terdapat evaluasi dewan komisaris terhadap pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh direksi.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. BPR telah menyusun dan melaporkan Laporan Profil Risiko Setiap Semester kepada OJK, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.2. BPR telah menyusun dan melaporkan produk dan aktivitas baru kepada OJK.



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

	3. BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah Terpenuhi	Perusahaan memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK yang dituangkan dalam Peraturan Direksi Nomor KP-01/09/Per.Dir/XI/2023.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Baik	Kebijakan, sistem, dan prosedur BMPK disusun dengan berpedoman pada POJK Nomor 23 Tahun 2022 yaitu Peraturan Direksi Nomor KP-01/09/Per.Dir/ XI/2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit tanggal 27 November 2023.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Sangat Baik	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan kredit besar mengacu pada POJK tentang BMPK dan Peraturan Internal Perusahaan yaitu, Peraturan Direksi Nomor 17/ XI/ Per.Dir/2024 Tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	BPR tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:			1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:			0 Indikator



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

Jl. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR.</p> <p>b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/ atau pelanggaran BMPK dilakukan dengan segera.</p> <p>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Perusahaan memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK yang dituangkan dalam Peraturan Direksi Nomor KP-01/09/Per.Dir/XI/2023.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan, sistem, dan prosedur BMPK disusun dengan berpedoman pada POJK Nomor 23 Tahun 2022 yaitu Peraturan Direksi Nomor KP-01/09/ Per.Dir/ XI/2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit tanggal 27 November 2023.2. Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan kredit besar mengacu pada POJK tentang BMPK dan Peraturan Internal Perusahaan yaitu, Peraturan Direksi Nomor 17/ XI/ Per.Dir/2024 Tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.2. BPR tidak pernah melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Telah Terpenuhi	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Telah Terpenuhi	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan yaitu Peraturan Direksi Nomor 1/ I/ Per.Dir/2025 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank dan kebijakan dan prosedur terkait sistem teknologi informasi yaitu Peraturan Direksi Nomor 16/X/Per.Dir.2024
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Baik	BPR telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Baik	<i>Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.</i>

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Baik	<i>Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.</i>
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Baik	<i>Pada tahun 2024 tidak terdapat kasus pengaduan nasabah yang ditujukan untuk BPR, Pengurus maupun Pegawai.</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		9 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)	



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

Jl. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

Kesimpulan Penilaian Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.BPR telah memiliki dan menginikasikan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang tidak bersifat signifikan dan dapat ditindaklanjuti segera.	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan yaitu Peraturan Direksi Nomor 1/ I/ Per.Dir/2025 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank dan kebijakan dan prosedur terkait sistem teknologi informasi yaitu Peraturan Direksi Nomor 16/X/Per.Dir.2024
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">BPR telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

	<p>transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>4. BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>5. BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>6. Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.</p> <p>2. Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>3. Pada tahun 2024 tidak terdapat kasus pengaduan nasabah yang ditujukan untuk BPR, Pengurus maupun Pegawai.</p>
2)	Faktor Negatif
	Masih terdapat kelemahan penerapan teknologi informasi dalam rangka mendukung kegiatan operasional belum menjadi perhatian, tercermin dari kelemahan core banking system diantaranya belum mengkomodir pelaksanaan APU dan PPT, namun sudah dilakukan perbaikan.



Faktor 12. Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Telah Terpenuhi	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Telah Terpenuhi	Rencana bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Baik	Secara garis besar RBB disusun berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan. b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. c. Penerapan Manajemen Risiko. Faktor-faktor tersebut diungkap dalam Ringkasan Eksekutif dan Strategi Bisnis dan Kebijakan Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan RBB, dilakukan setiap dilaksanakan rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat. Pengawasan secara pasif dilakukan dengan memantau perkembangan melalui laporan yang bisa diakses melalui sarana Teknologi Informasi.



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Baik	<i>Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan RBB dilakukan setiap dilaksanakan rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat. Pengawasan secara pasif dilakukan dengan memantau perkembangan melalui laporan yang bisa diakses melalui sarana Teknologi Informasi.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Baik	<i>Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		4 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)	



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

Kesimpulan Penilaian Faktor 12. Rencana Bisnis BPR	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</p>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.2. Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.3. Rencana bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Secara garis besar RBB disusun berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan. b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip ke hati-hatian. c. Penerapan Manajemen Risiko. Faktor-faktor tersebut diungkap dalam Ringkasan Eksekutif dan Strategi Bisnis dan Kebijakan Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan RBB, dilakukan setiap dilaksanakan rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat. Pengawasan secara pasif dilakukan dengan memantau perkembangan melalui laporan yang bisa diakses melalui sarana Teknologi Informasi.2. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan RBB dilakukan setiap dilaksanakan rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat. Pengawasan secara pasif dilakukan dengan memantau perkembangan melalui laporan yang bisa diakses melalui sarana Teknologi Informasi.
2)	Faktor Negatif



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.2. Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

Kesimpulan Akhir

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 2 (Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 4 (Kurang Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Nilai 4 (Kurang Memadai)
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 2 (Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 2 (Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 2 (Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 2 (Memadai)
Modus Nilai Faktor		Nilai 2
Median Nilai Faktor		Nilai 2
Rata-rata Nilai Faktor		Nilai 2.33
Peringkat Komposit		3
Predikat Komposit		Cukup Baik

Kesimpulan

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut akan segera diperbaiki pada periode penerapan tata kelola kedepan. Terhadap belum terpenuhinya struktur Komisaris Independen dan Komite, Direksi berkomitmen untuk mengkomunikasikan hal tersebut dengan Pemegang Saham dan untuk saat ini sedang berlangsung proses pengisian Komisaris Independen.

Faktor Positif

A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur

1. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
2. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
3. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.



4. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.
5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.
6. Struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
7. Struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
8. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR berada dalam kondisi terpenuhi secara keseluruhan.
9. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.
10. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.

B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada BPR saat ini dinilai memadai.
2. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang dimiliki BPR dinilai memadai.
3. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR berada dalam kondisi memadai.
4. Proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit dinilai memadai.
5. Proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR saat ini dinilai memadai.
6. Proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR dinilai memadai.

C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham yang dimiliki BPR dinilai memadai.
2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi BPR tergolong memadai.
3. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang dinilai memadai.
4. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan berjalan dengan memadai.
5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern dengan penilaian memadai.
6. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR adalah memadai.
7. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan penilaian memadai.
8. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi BPR tergolong cukup memadai.
9. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR yang dinilai memadai.

Faktor Negatif

A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur

1. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris belum sesuai dengan ketentuan yaitu paling sedikit 3 (tiga) orang. Namun, saat ini BPR hanya memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan



Komisaris dan salah satunya menjabat sebagai Komisaris Utama. Sehingga masih terdapat kekosongan yaitu jabatan Komisaris Independen, saat ini sedang proses rekrutmen dan akan dilengkapi pada semester 1 tahun 2025

2. Struktur organisasi telah disusun dengan memperhatikan penerapan tata kelola yang baik dan kompleksitas usaha BPR. Namun demikian belum dibentuknya komite audit dan komite remunerasi dan nominasi, yang akan dilengkapi saat proses konsolidasi

B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Fungsi dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Pada aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terdapat beberapa hal yang dapat disampaikan, antara lain sebagai berikut: a. risalah rapat dewan komisaris belum terdapat pembahasan terkait dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan, penerapan manajemen risiko, penerapan sistem pengendalian intern seperti evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko sekurang-kurangnya secara triwulanan serta pengawasan pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko sesuai profil risiko bank. b. fungsi kepatuhan belum terdapat bukti bentuk monitoring hasil tindak lanjut direksi atas hasil pengawasan dari dewan komisaris sebagaimana pasal 44 POJK Nomor 9 Tahun 2024. c. belum terdapat evaluasi dewan komisaris terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh direksi.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Terdapat kelemahan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, sebagai berikut: a. belum terdapat bukti tindak lanjut dari direksi terhadap arahan Dewan Komisaris. b. penerapan fungsi kepatuhan oleh Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan belum optimal terutama pada mitigasi risiko dalam proses perkreditan. c. belum terdapat kertas kerja monitoring terhadap pemenuhan temuan hasil audit baik internal maupun eksternal oleh direksi sebagaimana tata tertib kerja Dewan Komisaris.
3. Penerapan Fungsi Kepatuhan Terdapat kelemahan pada penerapan fungsi kepatuhan, yaitu: a. belum secara efektif mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan Direksi, melalui review ketentuan dan melakukan pengkinian, membuat SOP yang belum diatur, menyiapkan SOP baru sesuai ketentuan baru regulator b. belum adanya periode evaluasi ketentuan- ketentuan internal bank untuk melakukan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur c. belum terdapat kertas kerja yang digunakan untuk memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR sehingga tidak terdapat dokumentasi yang menunjukkan bahwa proses pemantauan tersebut telah dilaksanakan secara efektif
4. Penerapan Fungsi Audit Intern BPR telah menunjuk pegawai yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit internal. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian BPR terkait dengan penyusunan rencana pemeriksaan, antara lain: a. Proses perencanaan audit intern tahun 2024 oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) belum memuat cakupan sebagaimana Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7 / SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat. b. Audit intern belum pernah menyusun audit program sebelum melakukan pemeriksaan ke unit atau satuan kerja yang akan dijadikan obyek audit (auditee).
5. Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko belum terdapat evaluasi dewan komisaris terhadap pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh direksi.

C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan Pada posisi pemeriksaan, terdapat pelanggaran ketentuan antara lain terkait pelaksanaan restrukturisasi kredit dan kesalahan pelaporan laporan bulanan namun tidak berdampak material pada kondisi keuangan BPR
2. Kelemahan penerapan teknologi informasi dalam rangka mendukung kegiatan operasional belum



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

menjadi perhatian, tercermin dari kelemahan core banking system diantaranya belum mengakomodir pelaksanaan APU dan PPT.